

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Muhibtari (2014:1), Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan bangsa dan negara. Tujuan utama dari suatu pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Peningkatan pelayanan tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh terpadunya kontribusi beberapa faktor, seperti investasi, inflasi, pemberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), laju pertumbuhan penduduk, kontribusi angkatan kerja dan lain-lain. Untuk mencapai suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan harus fokus pada sektor-sektor strategis dan potensial pada wilayah tersebut baik sektor riil, finansial, maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan perubahan ekonomi. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan juga sangat penting dilakukan secara berkala melalui sajian data statistik yang berkualitas. Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan wewenang lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Selain itu, pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang sekarang berubah menjadi Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Regulasi aturan-aturan tersebut dirasakan sangat menyulitkan dalam hal pelaksanaannya karena disamping butuh waktu untuk mempelajari sekaligus memahami, kendala berikutnya adalah adanya aturan-aturan pelaksanaan yang belum dikeluarkan, baik itu turunnya dari Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah daerah itu sendiri sampai sekarang belum diwujudkan, tapi pemerintah tentunya tidak boleh hanya menunggu dengan tidak melaksanakan aturan yang ada. Kalau hal ini dilakukan sudah pasti ada pemeriksaan, maka akan menjadi temuan tentunya. Perubahan-perubahan aturan yang demikian cepat akan banyak menimbulkan masalah-

masalah dalam hal pengelolaan keuangan daerah terutama pada pertanggungjawaban akhir kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan. Meskipun laporan keuangan sudah bersifat *general purposive*, artinya dibuat lebih umum dan sesederhana mungkin untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak. Tetapi tidak semua pembaca laporan dapat memahami laporan tersebut dengan baik. Tidak semua pemangku kepentingan memahami akuntansi yang merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan. Karena tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan informasi keuangan itu untuk membuat keputusan, maka ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan

terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah Pemerintah Kabupaten Flores Timur berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Adanya penyelewengan-penyelewengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan pemerintah pada masa kekuasaan sebelumnya membuat masyarakat geram dan krisis kepercayaan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Untuk itu masyarakat atau penduduk sebagai salah satu sumber daya pembangunan memegang dua peranan penting dalam pembangunan yaitu sebagai subjek atau perilaku sekaligus sebagai objek pembangunan menginginkan adanya transparansi anggaran keuangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sehingga masyarakat atau penduduk juga dapat memantau kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Menurut Maisyuri (2017:54), penggunaan analisis rasio laporan keuangan sebagai alat analisis laporan keuangan secara luas telah banyak digunakan dan diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik, khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas. Padahal dari analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah dapat diketahui bagaimana kinerja pemerintah daerah

yang bersangkutan dan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah. Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah daerah, perlu diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja, adanya indikator kinerja akan membantu pemerintah dalam proses pengambilan keputusan anggaran dan dalam mengawasi kinerja anggaran pemerintah. Analisis

Menurut Wonda (2016:193), Analisis kinerja keuangan bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah, mengukur potensi pendapatan atau sumber ekonomi, mengetahui kondisi keuangan, mengetahui kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya dan meyakini bahwa pemerintah telah melaksanakan anggaran sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan adalah dengan rasio keuangan. Analisis rasio keuangan terdiri dari rasio kemandirian, rasio rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rasio pertumbuhan. Kemudian dari masing-masing perhitungan dilakukan analisis dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis rasio keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai pengambil andil terbanyak dalam upaya perkembangan suatu daerah.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini diangkat judul “**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015-2017)**”.

#### **B. Perumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masalah yang dapat dirumuskan oleh penulis yaitu bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur pada tahun 2015-2017 berdasarkan analisis rasio keuangan.

#### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah yang diperlukan agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis melakukan pembatasan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya dibatasi pada perhitungan Rasio Keuangan terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015-2017.
2. Rasio Keuangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :
  - a. Rasio kemandirian keuangan
  - b. Rasio derajat desentralisasi fiskla
  - c. Rasio efektivitas
  - d. Rasio efisiensi
  - e. Rasio keserasian belanja
  - f. Rasio pertumbuhan

3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang sekarang berubah menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 2008.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur pada tahun 2015-2017.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain :

1. Bagi pemerintah daerah

Penelitian ini dapat digunakan bagi pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur sehingga dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dimasa yang akan datang.

2. Bagi pihak investor dan masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan hasil kinerja pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur dalam mengoptimalkan potensi-potensi yang ada.

### 3. Bagi peneliti

Penelitian ini berguna dalam menambah wawasan peneliti dan dapat menjadi referensi dan data tambahan dalam mengembangkan penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **F. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penelitian ini dijabarkan dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan menggambarkan ringkasan dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran umum analisis kinerja keuangan pemerintah yang menjadi obyek dalam penelitian ini. Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini membahas tentang teori-teori yang melandasi penelitian ini, hasil penelitian terdahulu yang sejenis, kerangka penelitian dan hipotesis dari penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab metode penelitian menggambarkan metode penelitian secara operasional. Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.



#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis data.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu disajikan saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah.